

Pemanfaatan Data untuk Pembuatan Kebijakan dalam Penanggulangan Pengangguran di Kota Bandung Melalui Aplikasi *Bandung Integrated Manpower Management Application*

¹Agustian Nugraha, Khaerul Umam, Siti Alia

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; agustian.nurgraha@uinsgd.ac.id

Received: April 12, 2022; In Revised: June 16, 2022; Accepted: July 29, 2022

Abstract

Unemployment is one of the big issues in Indonesia's labour market. Which is due to lack of jobs, inflation, population explosion, or lack of investment, these factors are main reason the unemployment rates to rise, especially in Bandung. Thus, the Bandung City Manpower Service developed 'BIMMA' application to connecting companies and job seekers into one place as an online job fair in order to reduce unemployment rates. This study aims to describe the policies taken by the Bandung City Manpower Service based on included data of BIMMA application. Qualitative research with descriptive approach is used as a method in this study. The data was gathered through structured and semi-structured interviews, observation, documentation, and library research. Data analysis employs a pattern approach from the bottom up in a hierarchical approach, with data triangulation serving as the validity test. According to the result of this study, the data obtained from the BIMMA application is used as statistical data for reports to local government and as an indicator and reference for the agency to create work programs for the following year in the form of open training or internship through competency test on application to reduce unemployment in Bandung.

Keywords: E-government, Manpower, Unemployment

Pendahuluan

Pada pelaksanaan otonomi daerah dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Hal ini menunjukkan setiap daerah berhak untuk mengembangkan sebuah kebijakan dalam mengatasi permasalahan daerah itu sendiri yang berlandaskan kepada kepentingan masyarakat (Sinaga, 2021). Salah satunya masalah terkait pengangguran yang berfokus pada bidang ketenagakerjaan karena berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara. pengangguran terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, inflasi, ledakan penduduk ataupun minimnya investasi yang menyebabkan naiknya angka pengangguran salah satunya di Indonesia (Franita, 2016). Hal ini ditopang oleh tidak stabilnya akumulatif persentase angka pengangguran terbuka di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Tingkat Pengangguran Terbuka Akumulatif di Indonesia Pada Tahun 2018-2020

Per Bulan	2018	2019	2020
Agustus	5,30	5,23	7,07

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan pada tabel 1. di atas, akumulatif angka pengangguran di Indonesia mengalami tidak kestabilan dari 3 tahun terakhir. Pada tahun 2018 sebanyak 5,30 persen atau 7,05 juta penduduk, lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 5,23 persen dan

mengalami penambahan pada tahun 2020 sebanyak 7,07 persen atau 9,77 juta penduduk yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Hal ini menandakan bahwa permasalahan pengangguran hal yang sangat penting untuk segera ditangani oleh pihak pemerintah karena sangat berdampak pada perekonomian ataupun kesejahteraan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2021). Hal ini juga ditunjukkan pada tabel di bawah ini dengan terjadi peningkatan angka pengangguran dan partisipasi Angkatan kerja di berbagai kota di Jawa barat berdasarkan peringkat tertinggi yang salah satunya Kota Bandung pada tahun 2018-2020 di antara lain sebagai berikut:

Tabel 2

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kota di Jawa Barat, 2018 – 2020

	Kota	2018	2019	2020
1	Bogor	9,74	9,16	12,68
2	Sukabumi	8,57	8,49	12,17
3	Bandung	8,05	8,18	11,19
4	Cirebon	9,07	9,04	10,97
5	Bekasi	9,14	8,30	10,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2021)

Pada Tabel 2. Menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kota Bandung merupakan salah satu yang tertinggi pada cakupan wilayah Jawa Barat . Hal ini menandakan bahwa pada 3 tahun terakhir telah terjadi kenaikan angka pengangguran di Kota Bandung yang cukup signifikan (B.P.S Provinsi Jawa Barat, 2021).Hal ini dilihat dari angka pengangguran sekitar 8,05 % pada tahun 2018, meningkat kembali pada tahun 2019 sekitar 8,18% dan akhirnya menjadi 11,19% pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Lalu, pada partisipasi Angkatan kerja di Kota Bandung mengalami ketidak stabilan yang sekitar, 61,86% pada tahun 2018, pada tahun 2019 meningkat sekitar 65,90% dan mengalami penurunan sekitar 64,71% pada tahun 2020. Angka pengangguran tersebut berhubungan dengan jumlah penduduk sekitar 2.507.888 juta jiwa. Hingga pertengahan tahun 2020 terdapat jumlah orang pada angkatan kerja 1.288.260 orang dengan total yang bekerja 1.183.983 orang serta angka pengangguran kurang lebih 11,19 persen yaitu mencapai 105.067 orang (Awaludin, 2020).

Berdasarkan permasalahan di atas, terkait dengan tingginya angka pengangguran diperlukan terobosan atau inovasi dalam melakukan pelayanan publik menggunakan digital oleh pihak pemerintahan yang disebut *e-government* (Indrajit, 2007). Maka dari itu, terbitnya Instruksi Presiden (InPres) No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* yang mengindikasikan bahwa pemerintah fokus dalam pengembangan digitalisasi pemerintah untuk memberikan kemudahan informasi kepada publik (Surdin, 2016). Tak lepas dari itu juga dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bahwa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan akuntabel pada pelayanan berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan pada sistem dalam menunjang kebutuhan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Bahwa *e-government* melayani kebutuhan publik dengan pengelolaan data yang efektif serta informasi yang efisien (Aprianty, 2016). Maka dari itu, pemerintahan mengoperasikan pelayanan digital yang bertujuan untuk efektif dalam penyelenggaraan pemerintah berupa *mobile communication, internet, wireless devices* serta teknologi lain untuk mengimplementasikan solusi dari *e-government* (Napitupulu, 2015). Maka dari itu administrasi publik dengan *e-government* memiliki keterkaitan dikarenakan dengan adanya inovasi terkait pelayanan di pemerintahan dapat mempermudah dalam melayani kebutuhan masyarakat baik

pada proses administrasi, informasi maupun kebijakan yang berbasis digital menjadi lebih murah, cepat dan tanpa ada batasan ruang serta waktu dengan penyajian data pada kepentingan publik karena adanya percepatan data yang menciptakan pelayanan progresif serta responsif (Jumiati, 2010).

Berkaitan dengan pelayanan publik yang berhubungan *e-government* diperlukan sebuah terobosan atau inovasi yang berdasarkan kepada perkembangan teknologi salah satunya yaitu dengan menggunakan sistem *Big Data*. *Big Data* muncul berawal dari O'Reilly Media pada tahun 2005 ditandai dengan masifnya kajian dan penggunaannya baik oleh sektor privat atau sektor publik (Solihin, 2021). Pemanfaatan sistem *Big Data* pada dasarnya diterapkan pada banyak lembaga seperti UKM, perusahaan ataupun pemerintahan (Sirait, 2016). Maka dalam proses pemanfaatan data terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia mengenai dalam mewujudkan keterpaduan dan pengendalian pada proses pembangunan berupa dengan adanya data yang akurat serta mutakhir dalam proses pengelolaan data yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan kebijakan berbasis data yang akuntabel. Dikarenakan pemanfaatan kebijakan berbasis data ini, dapat memudahkan pemerintah dalam mengimplementasikan sistem *e-government* yang bertujuan untuk memudahkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan efektif yang dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun (Hakim et al., 2021).

Adanya sistem Big Data di Indonesia khususnya pada pelaksanaan *e-government* dapat meningkatkan pada pelayanan kepada publik serta respon *feedback* dari masyarakat itu sendiri pada pelayanan yang diberikan. Adanya respon tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam perencanaan kebijakan serta perbaikan pelayanan kepada publik berdasarkan pada data yang diperoleh seperti pada proses manajemen dan pengawasan keuangan negara (Islah, 2018). Maka, dengan adanya teknologi *Big Data* ini dapat mempermudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan secara komprehensif untuk bisa meningkatkan kualitas data serta kinerja dalam sektor pemerintahan pada pelayanan berupa proses administrasi maupun informasi yang berlandaskan kepada kepentingan masyarakat sehingga terciptanya kebijakan berbasis data atau disebut *data driven policy*.

Bahwa *data driven policy* dapat terjadi melalui sistem *data driven decision making capability* yang merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan yang strategis dikarenakan mengacu terhadap data-data yang dimiliki. Maka dari itu di dunia pemerintahan harus ada pihak yang bisa mengelola dan menggunakan data-data dalam volume besar, kompleksitas yang tinggi, keragaman data yang variatif serta kecepatan penambahan data yang begitu tinggi (Ahmad & Aliyudin, 2020). Dikarenakan perlu adanya inovasi kebijakan untuk bisa memberikan kebermanfaatan secara komprehensif yang berlandaskan pada nilai normatif dalam standarisasi kebijakan publik itu sendiri (Alia & Ratnasari, 2021). Pada implementasinya sistem *data driven decision making capability* dalam sektor pemerintahan mempunyai kesempatan untuk bisa mengoptimalkan data yang diterapkan dalam mengakses layanan baik berupa data kependudukan untuk bisa menciptakan kebijakan dari data yang didapatkan (Islah, 2018). Maka dengan adanya peluang dalam percepatan pendataan penduduk dalam menggunakan *data driven decision making* itu dapat mencegah atau mengatasi angka pengangguran di suatu daerah dengan berupa sebuah aplikasi dalam menghimpun data dengan berbagai proses seperti kemampuan tata kelola data, analitik data, eksploitasi wawasan, manajemen kinerja serta kemampuan integrasi (Jia et al., 2015).

Dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyediakan di sektor penempatan lowongan pekerjaan. Bentuk pelayanan ini adalah dengan menggelar bursa kerja secara *online* bagi para pengangguran dan pencari kerja di Kota Bandung melalui "*Bandung Integrated Manpower Management Application*

(BIMMA)”. Aplikasi BIMMA merupakan sistem informasi terpadu manajemen ketenagakerjaan yang mengintegrasikan pada seluruh bidang. Tujuan dari aplikasi BIMMA ini yaitu: (1) Adanya informasi bursa kerja bagi masyarakat ; (2) Untuk peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja masyarakat Kota Bandung; (3) Memudahkan pengelolaan data baik tenaga kerja maupun bursa kerja; (4) Memudahkan dalam proses mencari pekerjaan dan Penerimaan Tenaga Kerja ;serta (5) Menciptakan aplikasi BIMMA untuk bisa bersaing dengan aplikasi pencarian kerja kekinian (Sinaga, 2021).Maka dalam penerapan berlandaskan pada Peraturan Wali Kota 160 Tahun 2017 dalam UPT Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung mengenai terkait lingkup Latihan kerja yang berperan menjadi wadah berbasis digital dalam menciptakan individu berkompoten dengan adanya pelatihan yang profesional untuk bersaing dalam dunia kerja. Maka dari itu, diperlukannya tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat dan terstruktur untuk memaksimalkan pada proses layanan yang diberikan dengan berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat berupa hasil yang optimal (Halim et al., 2021).

Adanya sistem bursa kerja secara *online* diharapkan para perusahaan atau instansi ikut serta dengan membuka lowongan pekerjaan untuk para pencari kerja yang dapat menguntungkan antara satu sama lain dalam mengurangi angka pengangguran . maka pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan terkait ketenagakerjaan berupa menjamin hak dasar pekerja dalam kesamaan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan berupa adanya Pembinaan, pelatihan serta penempatan kerja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 13 Tahun 2003. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan memerlukan penanganan secara komprehensif dalam bidang praktisi di berbagai daerah dengan pengawasan preventif terhadap penyelenggaraannya. Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang telah diatur bahwa tenaga kerja merupakan bagian integral dari publik dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dengan adanya pendayagunaan dan perlindungan hak setiap pekerja serta menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dengan produktivitas kerja yang terjamin berupa kepastian dan kesamaan kesempatan kerja tanpa adanya diskriminasi. Peraturan Walikota Nomor 1386 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Bahwasanya Aplikasi BIMMA sangat berperan bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan di Kota Bandung berbasis *online*. Berdasarkan laporan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terjadi pengurangan pengangguran dari tahun ke tahunnya semenjak diterapkannya Aplikasi BIMMA ini. Sejak diresmikannya Aplikasi BIMMA jumlah pengangguran berkurang sekitar 107 ribu orang di tahun 2016. Lalu di angka 102 ribu orang pada tahun 2017 dan di tahun 2018 menjadi 96 ribu orang yang tidak bekerja. Pada hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya aplikasi BIMMA mampu memberikan dampak positif bagi menurunkan angka pengangguran (PROKOPIM, 2021). Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi kembali lonjakan terhadap angka pengangguran di kota Bandung. hal ini menyebabkan pada tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan yang berdampak pada partisipasi angkatan kerja tidak stabil pada tahun 2018-2020 di Kota Bandung. Tidak stabilnya angka pengangguran di kota Bandung bisa disebabkan oleh karena jumlah lowongan pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah pengangguran di kota Bandung yang mengacu pada tabel berikut ini :

Tabel 3.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandung 2018-2020

No	Daerah Jawa Barat	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)		
		2018	2019	2020
1	Kota Bandung	8,05	8,18	11,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung (2021)

Dari tabel tersebut telah terjadi ketidak stabilan dalam persentase pengangguran di kota Bandung dari Tahun 2018-2021 (B.P.S. Kota Bandung, 2021). Maka dari itu, penelitian ini dilakukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja serta pengembangan aplikasi BIMMA yang berkelanjutan di Kota Bandung dalam proses pengelolaan data untuk membuat kebijakan dalam penanggulangan pengangguran berbasis data. Berdasarkan berbagai hal tersebut, perlu adanya sebuah terobosan atau inovasi oleh pihak dinas untuk mengatasi angka pengangguran di Kota Bandung. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan data pada aplikasi BIMMA untuk membuat kebijakan berbasis data dalam penanggulangan pengangguran di Kota Bandung.

Adapun terkait penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti yaitu dari Felix Ezekiel Sinaga (2019) dengan judul “Efektivitas Pelayanan Bursa Kerja *Online* Melalui Aplikasi BIMMA Di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait efektivitas dari aplikasi BIMMA dalam proses pelayanan bursa kerja secara *online* yang dioperasikan oleh Dinas Tenaga kerja Kota Bandung. Peneliti ini memakai penelitian deskriptif berupa pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan penyebaran angket yang berhubungan dengan penelitian ini. bahwa hasilnya penelitian ini menunjukkan pengoperasian aplikasi BIMMA pada bursa kerja secara *online* sudah membaik dalam meningkatnya kesempatan kerja kepada pencari kerja. bahwasanya Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung perlu adanya pengkajian ulang dan memperbaiki dalam pengembangan Aplikasi BIMMA terkait ketersediaan informasi terkait pelayanan Bursa Kerja secara *online* supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Sinaga, 2021).

Selain itu, peneliti juga memakai penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fajriyah, Wawan Setiwan, Ernawati Dewi dan Tobias Duha yang berjudul ”Implementasi Teknologi Big Data di Era Digital” yang dijadikan referensi pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebermanfaatan teknologi Big Data dalam penerapannya maupun tantangan di beberapa lembaga pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif berupa Teknik pengumpulan data melalui studi literatur seperti buku, jurnal ataupun *website* yang berkaitan dengan penelitian. Pada hasil penelitiannya menggunakan 3 dimensi yaitu organisasi, tata Kelola dan analitik bahwasanya teknologi Big Data pada sampel data Lembaga yang diteliti masih terdapat banyak tantangan yang harus segera diatasi baik dalam ketersediaan data, standarisasi data, privasi data dan kompetensi Sumber daya manusia yang sangat berperan dalam proses memanfaatkan informasi yang ada untuk menjalankan roda pemerintahan dalam melayani kebutuhan publik (Fajriyah et al., 2022)

Referensi selanjutnya, peneliti mendapatkan acuan dari penelitian Emyana Ruth Eritha Sirait yang berjudul ”Implementasi Teknologi Big Data Di Lembaga Pemerintahan Indonesia”. penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui proses kegiatan sistem Big Data sudah dimanfaatkan terkhusus pada instansi pemerintah dapat menjalankannya baik dalam tantangan maupun penerapannya. Penelitian ini berupa deskripsi kualitatif dengan wawancara mendalam kepada empat Lembaga pemerintahan dengan dianalisis menggunakan metode *TDWI Big Data*

Maturity Model. Hasil penelitiannya pada sampel lembaga yang diteliti berada di tahap *pre-adoption* dan satu-satunya pemerintah kota Bandung yang mencapai pada *corporate adoption* (Sirait, 2016).

Selanjutnya, *novelty* atau hal yang membedakan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitiannya, penulis menggunakan teori *data driven decision making capability* yang dikemukakan oleh Lian Jia, Lagu Jiahe dan Dianne Hall (2015). Selain itu, peneliti melakukan analisis terkait *database* untuk bisa mengendalikan angka pengangguran di kota Bandung dengan data yang didapat melalui aplikasi BIMMA untuk membuat sebuah kebijakan dengan menggunakan teori *data driven decision making capability*. Dalam teorinya tersebut Lian Jia, Lagu Jiahe dan Dianne Hall (2015) mengemukakan beberapa dimensi untuk mengkarakterisasi berbagai aspek pengambilan keputusan berbasis data yang berperan dalam pengoptimalan pada proses pembuatan kebijakan berbasis data, di antaranya adalah:

1. *Data Governance Capability* merupakan proses pengelolaan data yang terorganisir serta terstruktur pada sebuah organisasi dengan melibatkan beberapa faktor yang saling terikat antara satu sama lain. Dalam hal ini, pada dimensi ini tata kelola data yang dilakukan untuk memudahkan organisasi dalam mencari data yang diperlukan berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan. Bahwa dari data yang telah diklasifikasikan berdasarkan tahapan penginputan data, pengumpulan data, integrasi data dan hal lainnya yang telah dikelola dengan tujuan mengadopsi pengambilan keputusan secara teliti dan akurat
2. *Data Analytics Capability* mengacu kepada kemampuan yang dilakukan untuk menafsirkan data ataupun informasi yang telah ditata secara struktur berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan dengan dapat memberikan metode dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Dalam hal tersebut, data yang telah dianalisis digabungkan dengan informasi yang telah ada untuk menghasilkan pengetahuan yang berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan secara strategis dengan informasi yang valid.
3. *Performance Management Capability* merupakan untuk mengembangkan kinerja yang diterapkan menjadi sistematis dan terukur dalam memberikan layanan dari strategi organisasi yang direncanakan. Bahwasanya manajemen kinerja dilakukan melalui proses pemantauan, evaluasi dan pengendalian dari tindakan yang berlandaskan pada hasil kinerja pada pencapaian organisasi yang telah ditetapkan.
4. *Insight Exploitation Capability* yaitu memanfaatkan data dari analisa yang dilakukan untuk dijadikan wawasan berdasarkan data serta diimplementasikan dalam tindakan untuk pengambilan keputusan kepada setiap aspek yang terhubung antara satu sama lain berupa pengembangan perangkat lunak, keuangan dan hal lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan kegiatan yang optimal dengan berdampak secara komprehensif.
5. *Integration Capability* merupakan pengintegrasian data dengan berbagai pihak internal maupun eksternal dalam arus informasi, komunikasi, konsistensi maupun infrastruktur dari data yang diperoleh dari organisasi tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh (Jia et al., 2015).

Dalam hal ini, peneliti menggunakan 4 (empat) dimensi dari teori *data driven decision making capability* yang dikemukakan oleh Lian Jia, Lagu Jiahe dan Dianne Hall (2015) yaitu *Data Governance Capability*, *Data Analytics Capability*, *Performance Management Capability* dan *Insight Exploitation Capability* untuk menganalisa terkait pemanfaatan data yang terdapat pada aplikasi BIMMA untuk dibuat sebuah kebijakan dalam menanggulangi angka Pengangguran di Kota Bandung. Maka dari itu, peneliti menggunakan 4 dimensi dari *data driven decision making capability* sebagai pisau analisis yang dinilai peneliti relevan dengan hal yang diinginkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, yaitu menjadi wadah bagi

masyarakat Kota Bandung untuk memudahkan mencari pekerjaan secara digital yang dilakukan dengan efektif dalam mengatasi angka pengangguran dari *database* yang diperoleh dari aplikasi BIMMA.

Berdasarkan masalah di atas maka dibutuhkan sebuah kebijakan dari data yang diperoleh di Aplikasi BIMMA untuk menanggulangi pengangguran di Kota Bandung. Maka dari itu peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan yang telah diterapkan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi BIMMA dalam penanggulangan pengangguran di Kota Bandung.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang diungkapkan melalui pendapat John W. Creswell. penelitian deskriptif kualitatif digunakan oleh peneliti karena relevan dengan masalah yang ada dan berhubungan pada tujuan penelitian berupa Analisa dan deskripsi terkait data yang terdapat pada aplikasi BIMMA untuk dibuat kebijakan yang berlandaskan berbasis data dalam penanggulangan pengangguran di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada kegiatan observasi penelitian dengan mendatangi Dinas tenaga kerja Kota Bandung serta melakukan wawancara melakukan cara baik secara terstruktur maupun semi-struktur untuk memperoleh informasi yang valid dengan ditopang studi dokumentasi dari laporan instansi yang bersangkutan. Sedangkan studi literatur yaitu dengan melakukan telaah terhadap referensi-referensi seperti buku, jurnal, dan pemberitaan di media elektronik. Dalam memperoleh data informan untuk hasil penelitian, Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang bahwasanya memilih seorang informan yang terdapat kriteria tertentu atau ahli di bidangnya dalam mewakili populasi pada lokus penelitian yang dilakukan supaya informasi yang didapatkan teruji validitas datanya, maka bisa memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis terkait penerapan dari data pada aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (Creswell, 2019). Data informan yang ada dalam penelitian yaitu Kepala bidang Pelatihan dan Penempatan kerja sebagai Informan Kunci, lalu Sub Bagian Program Sebagai informan utama dan staf teknis Aplikasi sebagai informan pendukung yang jumlah informan secara keseluruhan sebanyak 4 orang.

Maka pada penelitian kualitatif ini berdasarkan pada pemikiran Creswell berupa membangun pola dari bawah ke atas dalam pendekatan hierarki pada teknik analisis data. Pada bagian tahap pertama dilakukan pengolahan data dengan melibatkan transkrip wawancara serta data lainnya yang dilanjutkan dengan literasi pada keseluruhan data secara komprehensif. Setelah itu, dilakukan pemisahan data menjadi berbagai aspek untuk bisa dideskripsikan menjadi bentuk laporan. Setelah itu dilakukan pemaknaan data atau diinterpretasikan dari hasil analisis data tersebut. Tahap Akhirnya dilakukan uji validitas dengan triangulasi data berupa mengkaji kebenaran informasi yang didapatkan baik dari dokumen, observasi atau hasil wawancara yang lebih dari satu sumber atau sudut pandang yang berbeda untuk menguji validitas data tersebut yang penelitiannya dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (Creswell, 2019).

Hasil dan Pembahasan

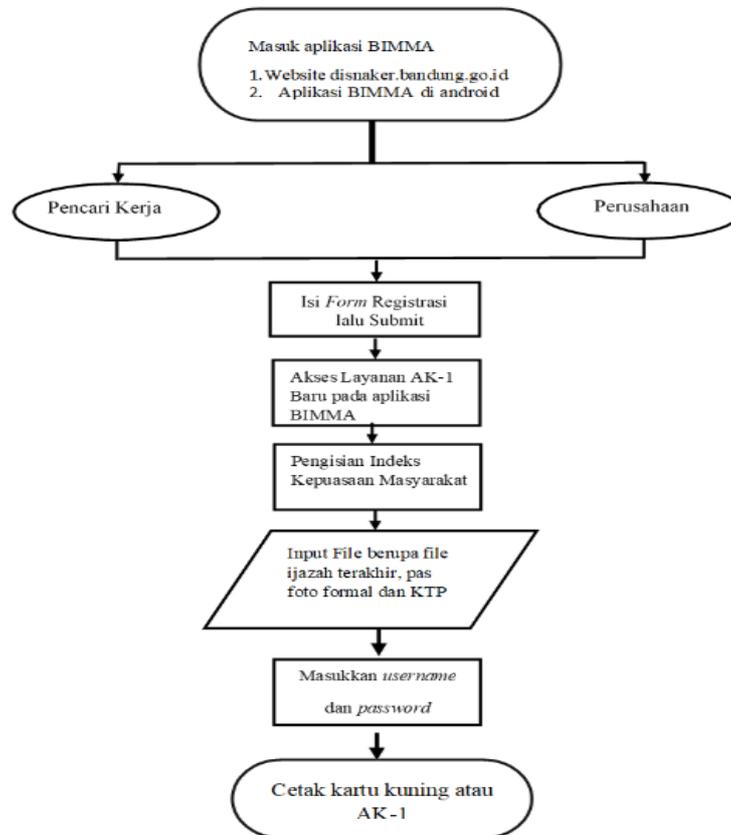
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung merupakan salah satu instansi pemerintahan yang proses layanannya menggunakan digitalisasi atau sistemnya menggunakan *e-government* dalam melayani publik berupa memudahkan masyarakat kota Bandung untuk mencari

pekerjaan melalui sebuah Aplikasi yaitu BIMMA (*Bandung Integrated Manpower Management Application*). Aplikasi ini sudah tersedia dan beroperasi baik di android maupun di website untuk melakukan berbagai kebutuhan bagi para pencari kerja. Aplikasi BIMMA ini merupakan wadah bagi para pencari kerja untuk mencari lowongan pekerjaan di berbagai perusahaan yang telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung melalui digital yang bertujuan untuk bisa mengurangi angka pengangguran di Kota Bandung menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga Aplikasi BIMMA ini, tidak hanya layanannya berupa menyediakan lowongan pekerjaan saja tetapi masih banyak fitur lainnya seperti Pembuatan kartu kuning, Pelatihan Uji Kompetensi, Pengajuan Padat karya, layanan Pengaduan, pemagangan dan hal lainnya. Dengan berbagai macam fitur layanan yang terdapat pada aplikasi BIMMA ini khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, secara tidak langsung data para pencari kerja atau pengguna aplikasi terkumpul menjadi sebuah *database* dari berbagai macam klasifikasi masyarakat. Maka dari itu, dari data yang diperoleh pada aplikasi BIMMA kebijakan seperti apa yang diterapkan untuk mengatasi pengangguran di Kota Bandung. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan analisis terkait kebijakan berbasis data yang diterapkan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari *database* yang diperoleh pada aplikasi BIMMA yang berdasarkan pada teori Lian Jia, Lagu Jiahe dan Dianne Hall mengenai *data driven decision making capability*. Berikut ini hasil analisis dari penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan berbagai dimensi terkait proses *data driven decision making capability*:

1. *Data Governance Capability*

Berdasarkan pada dimensi *Data Governance Capability* atau kemampuan tata kelola data, hal tersebut berperan penting dalam membuat kebijakan berbasis data seperti tata kelola data yang terorganisir, kualitas data yang valid, proses manajemen data yang baik serta kemampuan organisasi dalam mengelola data yang efektif berperan dalam menunjang untuk pengambilan keputusan dari data yang diperoleh untuk dibuat sebuah kebijakan (Jia et al., 2015). Begitupun menurut Islah (2018) Bahwasanya pemerintah perlu adanya tata kelola data yang baik pada sistem *e-government* yang diterapkan untuk membuat sebuah keputusan atau kebijakan dari big data atau *database* yang diperoleh berdasarkan data statistik pengguna terhadap layanan yang digunakan (Islah, 2018). Berdasarkan tata kelola data yang dilakukan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pada aplikasi BIMMA ini dilakukan secara keseluruhan oleh sistem atau otomatis tetapi juga terdapat petugas untuk melakukan verifikasi data yang terinput sebelum masuk otomatis kepada *database* Dinas berupa data perusahaan yang terdaftar, lowongan pekerjaan, dan data pencari kerja. Pada proses para pencari kerja mencari pekerjaan dilihat pada pembuatan AK-1 secara *by sistem*. proses pembuatan AK-1 melalui prosedur yang harus dilakukan seperti sebagai berikut:

Gambar 1.
Prosedur Penggunaan Pembuatan Akun Pencari Kerja Melalui Aplikasi BIMMA

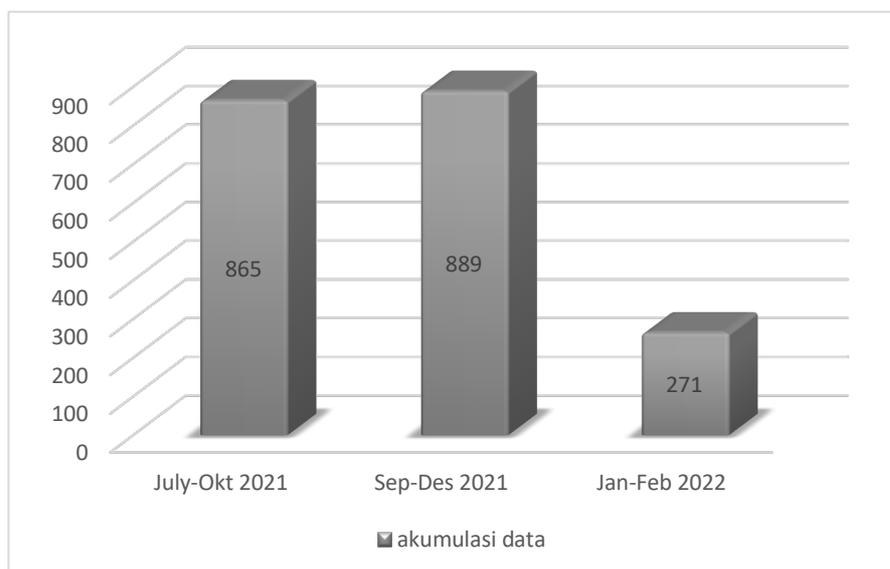


Sumber; Aplikasi BIMMA (Diolah Peneliti,2022)

Dengan adanya sistem penginputan data secara otomatis hal tersebut sangat memudahkan para pegawai dinas untuk melakukan pelayanan dengan efektif dan efisien. Hal ini ditunjang dengan proses pengoperasian aplikasi BIMMA ini dengan mudah oleh para pengguna atau masyarakat dalam proses baik dalam pembuatan AK-1 atau kartu kuning, pengajuan pendirian padat karya ataupun hal lainnya yang berfokus untuk mengatasi permasalahan yang ada khususnya mengurangi angka pengangguran. Salah satunya dalam proses pembuatan AK-1, para pengguna atau pemohon diminta untuk melakukan penginputan data berupa mengisi biodata diri, melampirkan *file* ijazah terakhir, pas foto dan KTP untuk bisa melakukan pencetakan kartu kuning secara individu serta adanya survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui respon pengguna pada pengoperasian aplikasi BIMMA. Dalam proses pengerjaannya dalam pembuatan Kartu Kuning atau AK-1 hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit untuk mencetak kartu kuning tersebut. Apabila terdapat kebutuhan laporan dengan format tertentu atau khusus bisa dilakukan pengajuan kepada pihak teknisi yang diakomodir seluruh kebutuhannya. Dengan kemudahan dalam penggunaan aplikasi BIMMA ini menyebabkan masyarakat mulai meningkat dalam proses layanan secara digital. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengguna Aplikasi BIMMA pada Tahun 2021-2022 yang ditunjukkan berupa tabel berikut ini:

Grafik 1.

Data Pengguna Aplikasi BIMMA di Tahun 2021-2022



Sumber: Database Aplikasi BIMMA (Diolah Peneliti,2022)

Pada akumulasi data tabel di atas, pengguna aplikasi mencapai 2025 pengguna per Februari 2022. Hal ini menunjukkan respon masyarakat terhadap adanya inovasi tersebut cukup baik dikarenakan pelayanannya dilakukan secara digital yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bahwa pada aplikasi BIMMA masyarakat dapat membuat AK-1 secara *online* serta langsung bisa dicetak oleh pengguna itu sendiri. Maka dari itu, hal ini memudahkan masyarakat untuk melakukan layanan apapun karena dilakukan *by sistem* atau secara otomatis pada aplikasi tersebut. Tetapi masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui aplikasi BIMMA ini sehingga masih ada publik yang datang ke kantor untuk pembuatan AK-1 secara *offline* atau langsung. Hal ini perlu adanya edukasi dan sosialisasi dari pihak dinas untuk melakukan kampanye baik secara digital ataupun langsung melalui kantor kecamatan atau kelurahan di Kota Bandung.

Dari data yang diperoleh langsung diintegrasikan supaya data yang masuk ke *database* tidak ada kesalahan apapun atau sumber informasi yang berbeda. Sebelum adanya pencetakan kartu kuning ataupun hal lainnya dari data yang diinput oleh pengguna di verifikasi terlebih dahulu oleh petugas untuk melakukan cek ulang data jika terdapat kesalahan pada data yang input. Jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian penginputan data oleh pemohon, maka akan ada penolakan berupa pemberitahuan pada laman pengguna yang harus dilakukan registrasi ulang dengan nomor resi yang berbeda lagi dan sudah diberitahukan pada laman registrasinya jika terdapat kesalahan dalam penginputan data serta menjadi tanggung jawab pemohon tersebut. Maka jika data telah di verifikasi dan datanya valid secara otomatis data tersebut masuk kepada *database* dinas sesuai layanan yang digunakan dan hal tersebut juga berlaku pada sistem layanan lainnya. Dengan berbagai pelayanan yang ada di aplikasi BIMMA, pada pemisahan data dilakukan *work flow engine* yang dibedakan nomor identitas secara otomatis dengan diklasifikasikan setiap pelayanannya. Maka dari itu, data terpisah secara otomatis sesuai dengan folder pelayanan yang ada yang langsung masuk ke *data base*. Berikut ini merupakan tabel terkait pemisahan data oleh yang dibedakan dengan kode pada setiap pelayanannya di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.
Layanan pada Aplikasi BIMMA

No	Layanan	Kode
1	Pengajuan Padat Karya	PT-03
2	Pencatatan Perselisihan	HI-01
3	Uji Kompetensi	LT-07
4	Pendaftaran pemagangan	LT-08
5	Layanan Pengaduan	ST-02
6	Permintaan Informasi Publik	ST-01
7	AK-1 Baru	PT-01

Sumber: Aplikasi BIMMA (Diolah Peneliti,2022)

Bahwa dengan adanya perbedaan kode dari berbagai layanan pada pengumpulan data, memudahkan petugas atau teknisi untuk mencari data yang diperlukan dalam pembuatan statistik, laporan ataupun kebutuhan pemerintah yang dikumpulkan pada sebuah folder yang bernama reporting data, dimana keseluruhan data berada di tempat tersebut. Apabila terdapat kebutuhan laporan dengan format tertentu atau khusus secara mendadak dapat dilakukan dengan efektif dikarenakan bisa dengan mudah menemukan data yang sesuai dari keinginan pihak terkait.

2. Data Analytics Capability

Kemampuan Analisa dalam seleksi data sangat berperan penting dikarenakan hanya data tertentu yang dipakai dalam sebuah pengambilan keputusan dari basis data yang didapat (Anggraeni et al., 2013). Menurut Kim *et al* (2005) bahwa dalam pengelolaan sebuah data diperlukan kemampuan Analisa yang teliti dan terampil dikarenakan dapat memberikan sebuah metode atau strategi untuk memfasilitasi sebuah organisasi atau instansi dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Dari data yang telah dikumpulkan dan dikelola dilakukan sebuah evaluasi untuk digabungkan dengan berbagai informasi yang ada untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan dalam mengambil keputusan atau tindakan yang strategis (Jia et al., 2015).

Hal tersebut dilakukan dan diterapkan oleh Dinas Tenaga kerja Kota Bandung pada aplikasi BIMMA seperti melakukan Analisa data para pengguna untuk pembuatan AK-1 dengan langsung diverifikasi supaya pencari kerja dapat langsung melamar pekerjaan kepada perusahaan yang dituju. Selain itu, ditunjukkan bahwa setiap data yang diinput oleh pengguna dipastikan data yang masuk merupakan data pribadi yang valid dikarenakan pada laman aplikasi sudah terdapat peringatan apabila terdapat data yang dipalsukan atau ditiadakan maka hal tersebut bisa ditindak lanjuti ke hukuman pidana tidak terkecuali kepada pihak perusahaan yang ingin mendaftarkan lowongan pekerjaan kepada aplikasi BIMMA ini yang hukumannya terikat dengan Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1, UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang isinya berupa bahwa jika terdapat individu atau instansi yang melakukan manipulasi data atau informasi melalui elektronik yang dilakukan dengan sengaja untuk membuat data secara otentik. Karena data yang masuk ke aplikasi BIMMA baik pencari kerja ataupun perusahaan merupakan data yang dipublikasikan informasi yang valid sehingga tidak merugikan pihak manapun serta data tersebut dijadikan laporan dalam menciptakan program kerja baru ataupun transparansi data kepada pemerintah pusat.

Bahwasanya dari data yang dilampirkan oleh pihak perusahaan kepada pihak Dinas berupa syarat administrasi yang detail sekaligus data penanggung jawab perusahaan baik berupa data pengangguran, bidang lowongan pekerjaan data pekerja terbaru baik yang diterima ataupun dikeluarkan jaminan sosial tenaga kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), gaji pegawai serta hal lainnya yang menunjang kesejahteraan pegawai ketika bekerja di perusahaan tersebut dengan data terbaru tiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan bahwa hanya beberapa perusahaan yang lowongan pekerjaannya terdapat pada aplikasi BIMMA yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.
Rekapitulasi Total Perusahaan Yang Daftar Pada Aplikasi BIMMA Pada Tahun 2021

Jumlah Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Membuka Lowongan Pekerjaan	Lowongan Kerja Yang Tedaftar
317 perusahaan	22 Perusahaan	70 Loker

Sumber: Aplikasi BIMMA (Diolah Peneliti,2022)

Dari tabel di atas dapat diketahui baru 317 perusahaan yang terdata oleh pihak dinas dan hanya 22 perusahaan yang dapat memberikan lapangan pekerjaan pada pencari kerja dengan sekitar 70 lowongan pekerjaan. Hal ini menandakan bahwa perlu adanya kolaborasi dan transparansi laporan dari pihak perusahaan kepada pihak dinas untuk bisa membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Bandung. Maka dari itu, data yang diperoleh pihak dinas dilakukan observasi ke perusahaan tersebut dengan menindaklanjuti administrasi yang telah diterima untuk sinkronisasi data yang diberikan sehingga informasi pada aplikasi BIMMA merupakan data yang valid. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan seperti masih banyaknya perusahaan yang belum bekerjasama dengan pihak dinas dikarenakan tidak mau mengikuti syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku. Akan tetapi, dari hasil wawancara dengan kepala bagian program bahwa perusahaan yang telah bergabung di aplikasi BIMMA tidak ada perjanjian atau jaminan secara tertulis dengan pihak dinas dan apabila terdapat penyelewengan atau pemalsuan data hanya terikat oleh Undang-Undang ITE. Maka dari itu, masih terdapat perusahaan yang belum melakukan wajib lapor kepada pihak dinas berupa jumlah pekerja yang diterima maupun dikeluarkan. Hal ini menyebabkan sulitnya pihak dinas melakukan analisa data dikarenakan data yang di dapat belum menyeluruh sehingga dibuat dengan seadanya.

3. Performance Management Capability

Pada setiap kegiatan pelaksanaan dalam melayani publik kemampuan manajemen kinerja merupakan hal yang fundamental untuk menciptakan pelayanan dengan cepat dan tepat. Hal ini diperlukan karena pada setiap kebutuhan masyarakat semakin meningkat tiap tahunnya. Maka dari itu, perlu adanya manajemen kinerja yang terampil dalam pengendalian, pemantauan ataupun evaluasi secara terstruktur untuk menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien yang diukur berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan. Karena manajemen kinerja memfasilitasi untuk membuat sebuah keputusan secara objektif yang berlandaskan dari pencapaian tujuan organisasi ataupun instansi (Hall, 2008).

Pada prinsip *Performance Management Capability* dijadikan acuan pada penelitian, bahwa dalam manajemen kinerja pada pengoperasian aplikasi bisa sejauh ini berjalan dengan efisien. Hal ini didasari karena pada setiap layanan yang terdapat pada aplikasi ditempatkan masing-masing verifikatornya atau admin dari layanan tersebut. Maka dari itu, ketika ada

pelayanan atau kebutuhan dari pengguna dapat langsung dijalankan karena terdapat petugas yang berfokus untuk memonitori tanggung jawab layanan yang diberikan. Verifikator ini bertugas untuk menyaring data yang diinput oleh pengguna apabila terdapat kesalahan dalam proses penginputan sebelum data tersebut otomatis masuk kepada database instansi pada aplikasi BIMMA. Lalu terdapat Sumber daya manusia bagian program yang mengontrol jalannya aplikasi BIMMA, jika terjadi kendala pada pengoperasian yang dibantu juga oleh pihak eksternal dalam mengatasi masalah. Selain itu bagian program memiliki tupoksi dalam pengembangan sistem, konten serta fitur layanan pada aplikasi supaya para pengguna dapat dengan mudah dan cepat dalam menggunakan aplikasi tersebut. Maka dari itu dari hasil wawancara peneliti dengan kepala bagian program bahwasanya pada pengoperasian aplikasi, bagian program dibantu oleh sumber daya manusia pada tiap bidangnya dalam memverifikasi setiap layanan dari bidang yang terkait. Hal ini dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat pada aplikasi BIMMA yang dilampirkan oleh peneliti dalam bentuk akumulasi di antaranya sebagai berikut:

Tabel 6.
Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pengoperasian Aplikasi BIMMA Pada Tahun 2021

Jumlah Peserta Survey	Nilai IKM	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan
2025 Orang	87.11	3.48	B

Sumber: Aplikasi BIMMA (Diolah Peneliti,2022)

Pada tabel di atas, peneliti menunjukkan bahwa dari hasil rekapitulasi pengguna aplikasi BIMMA cukup baik dalam proses pelayanannya. Hal ini berupa nilai kepuasan pada aplikasi dengan performa yang baik, didorong dengan pelayanan yang efektif dan efisien serta kemudahan dalam setiap layanan yang dioperasikan oleh para pengguna. Bahwasanya dengan tabel tersebut, secara kuantitas sudah cukup tetapi secara kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan lagi dalam pengoperasian aplikasi ini. dikarenakan perlu adanya peningkatan dari para verifikator yang tidak hanya melakukan verifikasi data yang masuk saja tetapi juga perlu memahami alur masing-masing layanan terkait pengoperasian aplikasi BIMMA secara menyeluruh.

Tetapi masih terdapat kesalahan dari petugas berupa dalam proses mencetak kartu kuning seperti ketika dicetak yang keluar hanya nomor resi pendaftaran. Hal tersebut di dasari kurang teliti dari petugas dalam mengecek data tersebut sehingga terjadi *error* pada sistem tersebut. Bahwa petugas memiliki peran untuk melakukan verifikasi data sebelum melakukan pencetakan kartu kuning ataupun hal lainnya untuk menghindari kekeliruan dalam proses pelayanan. Apabila terdapat sebuah *error* dari sistem petugas dapat memperbaiki dari hal tersebut. bahwa dengan cepatnya perkembangan dalam bidang digital diperlukan adanya pelatihan atau *workshop* kepada sumber daya manusia secara berkelanjutan supaya menghasilkan petugas yang adaptif. Selain itu, diperlukan sumber daya manusia yang berfokus kepada *content development* supaya terdapat berbagai fitur layanan yang baru dan edukatif bagi pengguna serta sesuai dengan tujuan dari adanya aplikasi tersebut.

4. Insight Exploitation capability

Kemampuan wawasan sangat berperan dalam setiap kegiatan yang dijalankan, dikarenakan hal tersebut merupakan fundamental dalam proses pengambilan keputusan yang dilihat dari berbagai sudut pandang baik dari informasi internal maupun eksternal untuk

menghasilkan keputusan yang objektif. Berdasarkan menurut Lavallo (2011), kemampuan eksploitasi wawasan memberikan kemudahan bagi organisasi ataupun instansi untuk mengambil keputusan yang objektif dari data yang telah di analisis untuk memperbaiki atau mengembangkan sistem yang sudah ada menjadi lebih efektif dan efisien. Kemampuan wawasan ini juga dapat menjadi dasar perubahan atau perbaikan sistem baik pengembangan perangkat lunak, layanan ataupun hal lainnya dari data yang diperoleh dan dianalisis dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis teknologi (Lavallo et al., 2011).

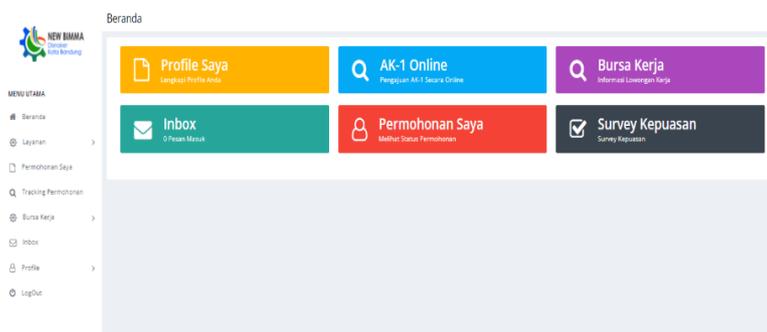
Bahwa hasil penelitian yang dilakukan pada aplikasi BIMMA ini, sistem layanan yang disediakan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung memiliki banyak fitur layanan yang awalnya hanya ada untuk pembuatan kartu kuning serta lowongan kerja perusahaan saja telah dilakukan perubahan dan pengembangan aplikasi menjadi berbagai layanan seperti pengajuan padat karya, pelatihan, pemagangan dan hal lainnya yang berfungsi untuk menjadi wadah bagi masyarakat kota Bandung untuk meminimalisir angka pengangguran. Tak lepas dari itu, pada aplikasi ini dilakukan pengembangan sistem maupun layanan setiap satu tahun sekali hal ini dilakukan dari kebutuhan instansi dalam menjalankan program yang ingin di jalankan pada tahun berikutnya ataupun dari respon masyarakat untuk menciptakan layanan yang dapat membuat kegiatan produktif berupa pelatihan atau pemagangan yang dilakukan secara rutin ataupun berdasarkan skala prioritas yang telah dilakukan analisa terlebih dahulu. Pada proses pengembangan aplikasi ini di dapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung. Bahwa dari hasil analisa dari data yang diperoleh baik dari internal maupun eksternal dapat dijadikan acuan dalam pengoptimalan pelayanan pada aplikasi tersebut. Hasil analisa data dikembangkan menjadi dua aspek untuk meningkatkan pada aplikasi tersebut di antaranya pengembangan perangkat lunak dan wawasan berbasis data. Berikut ini merupakan hasil analisa pada indikator tersebut;

Pengembangan Perangkat Lunak

Pada aplikasi ini proses pengembangan keamanan data menggunakan SSL (*Secure Socket Layer*) yang telah tersertifikasi serta berfungsi untuk mengenkripsi dan mengacak informasi tersebut sehingga tidak akan bisa dibaca oleh pihak tertentu serta menjaga kerahasiaan data baik pencari kerja maupun perusahaan yang terkait. Lalu dalam menginput data identity melalui HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*) supaya data yang diinput tidak dapat tercuri oleh *hacker* dan menggunakan Bandung.go.id yang terdaftar di *website* pemerintahan untuk menghindari manipulasi *website* aplikasi BIMMA ini. aplikasi BIMMA ini laman websitenya langsung menggunakan laman instansi jadi secara otomatis laman tersebut langsung terdapat fitur layanan aplikasi ini. selain itu, dalam pengembangan perangkat lunak pihak instansi melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau eksternal dalam melakukan proses pengembangan aplikasi tersebut. Maka hal ini, Aplikasi BIMMA dapat memberikan fitur yang mudah dipahami bagi para pencari kerja ataupun perusahaan ketika menggunakan aplikasi tersebut seperti di bawah ini:

Gambar 2.

Tampilan Aplikasi BIMMA Pada Website Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung



Sumber: Hasil penelitian (Diolah Peneliti,2022)

Dalam tampilan layanan pada aplikasi BIMMA selain untuk mencari pekerjaan, terdapat juga fitur layanan yang dapat dilakukan hanya melalui 1 akun sehingga memudahkan pengguna dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Selain itu, para pengguna hanya dapat mengakses aplikasi tersebut melalui dua kanal yaitu *website* Disnaker Kota Bandung dan *Mobile (Play store)*. Selain itu, pada sistem layanan aplikasi BIMMA masih terdapat keluhan dari pihak perusahaan maupun masyarakat seperti masih terjadi error dalam pencetakan kartu kuning pencari kerja yang harusnya data kartu kuning menjadi nomor resi atau registrasi ketika pencetakan kartu tersebut. Lalu dari hasil wawancara dengan staff teknisi atau verifikator, bahwa terdapat keluhan dari perusahaan dalam penginputan data terkait pemagangan atau pembuatan Perjanjian Kerjasama waktu tertentu (PKWT) yang dilakukan di aplikasi BIMMA.

Pada proses pengajuan dan pembuatan PKWT hanya terbatas pada data pekerja untuk sekali input atau juga tergantung data yang di input. Bahwasanya setiap perusahaan dalam proses pembuatan PKWT hampir 500-1000 data pekerja. hal ini menandakan pihak perusahaan perlu melakukan penginputan beberapa kali yang secara manual karena hal tersebut dibutuhkan dengan waktu cepat. Hal ini terjadi karena terbatasnya *Random Access Memory (RAM)* dalam *Pilot server* pada aplikasi, maka untuk mengatasi hal tersebut pihak instansi perlu melakukan penambahan kapasitas dalam pengembangan limitasi data supaya dalam melakukan penginputan data terkait PKWT maupun pemagangan dapat dilakukan dengan sekali penginputan. Maka dari itu, pihak instansi perlu ada pengembangan secara berkala supaya dapat meningkatkan kecepatan dan kemudahan baik pencari kerja ataupun perusahaan dalam proses penginputan data di aplikasi BIMMA ini.

Wawasan Berbasis Data

Dalam hal tersebut, *database* yang diperoleh dari aplikasi BIMMA digunakan dinas untuk dijadikan sebuah indikator untuk mengevaluasi dari aplikasi tersebut ataupun dapat dijadikan sebuah program kerja baru di tahun selanjutnya dalam bentuk laporan data statistik yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Dari akumulasi data tersebut dapat dijadikan acuan oleh pihak dinas untuk menciptakan program pada aplikasi tersebut berupa pelatihan uji kompetensi ataupun pemagangan seperti perhotelan, *Housekeeping*, *front office*, administrasi perkantoran, *English for frontliner*, *Web Programming*, *network administrator*, Desain Grafis dan hal lainnya yang berkerjasama dengan UPT Balai Latihan Kerja (BLK). Kegiatan pelatihan dan pemagangan dapat dilakukan oleh siapapun masyarakat kota Bandung yang tanpa dipungut biaya dan dilakukan selama 3 Bulan. Setelah itu, masyarakat yang telah selesai melakukan pemagangan ataupun pelatihan mendapatkan sertifikasi ahli dari pelatihan yang diikuti dan secara tidak langsung dapat membentuk individu yang berkompeten di bidangnya.

Bahwa apabila terdapat sebuah program dari pihak dinas yang kurang diminati hal tersebut dapat dihilangkan atau diperbaiki program kerja tersebut. Bahwa aplikasi BIMMA ini hanya sebagai wadah untuk mencari pekerjaan tetapi berperan juga untuk menjadi wadah dari statistik partisipasi pencari kerja baik terhadap respon dari program dan pelatihan yang terlaksana yang dapat dijadikan untuk bahan evaluasi oleh pihak dinas .Selain itu, pihak dinas menerapkan sebuah kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dilihat dari respon masyarakat lewat akun sosial media, website dinas yang keputusannya tidak hanya berpatokan dari data aplikasi BIMMA ini. maka dari itu, setiap kebijakan atau keputusan program kerja baru dari pihak dinas dilihat dari berbagai sumber informasi baik dari internal maupun eksternal. Proses pengambilan keputusan dari pihak dinas terkait program kerja yang akan dijalankan tercipta dikarenakan salah satu indikator dari data laporan dinas terkait target dan realisasi dalam mengatasi pengangguran tiap tahunnya. hal ini dapat dilihat dari LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terkait data dari target dan jumlah lowongan kerja yang mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 7.

Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Lowongan Kerja

Lowongan Kerja Terdaftar	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	9.25	10.87	117.51
2020	9.38	6.40	68.23

Sumber : LKIP Dinas Tenaga kerja Kota Bandung (Diolah Peneliti,2022)

Berdasarkan Tabel di atas, persentase pada tahun 2019 memiliki target 9.25% dan terealisasi sekitar 10.87% dengan pencapaian 117.51% . Sedangkan pada tahun 2020 memiliki target sekitar 9.38% tetapi hanya terealisasi sekitar 6.40% dengan capaian 68.23% dikarenakan adanya pandemi COVID-19 pada tahun tersebut dengan kriteria lulusan LPK,SMK, UPT BLK dan pemagangan. Angka pengangguran sangat berpengaruh pada capaian tenaga kerja yang secara jumlah telah terealisasi 9.407 orang tetapi tidak sebanding dengan jumlah pengangguran dari 96.465 orang pada tahun 2019 menjadi 147.091 orang terdapat kenaikan 15.25% pengangguran pada tahun 2020.Dari data tersebut dengan belum terealisasi angka pengangguran pada tahun 2020 maka perlu ada tindakan lanjutan dari pihak dinas untuk bisa memberikan kegiatan yang edukatif untuk bisa menciptakan individu yang berkompeten berupa pelatihan dalam membuat usaha lokal, pelatihan *softskill* maupun *hardskill* serta memberikan pemagangan di berbagai perusahaan untuk menciptakan publik yang berkualitas. Untuk meningkatkan angkatan kerja tiap tahunnya, diperlukan sebuah inovasi pada aplikasi BIMMA yang tidak hanya sebagai wadah untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat tetapi juga bisa sebagai sarana pelatihan berbasis digital pada aplikasi tersebut supaya dapat mengetahui dan mengukur kompetensi tiap individu dalam pelatihan yang diikuti pada aplikasi BIMMA.

Simpulan

Berdasarkan hasil pada penelitian di atas, bahwa dalam pemanfaatan data pada di aplikasi BIMMA dalam mengurangi angka pengangguran di kota Bandung melalui dimensi dari teori *data driven decision making capability*, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dari data yang diperoleh dari aplikasi BIMMA hanya dijadikan data statistik laporan kepada pemerintah daerah serta dijadikan indikator atau acuan pihak dinas untuk menciptakan program kerja di tahun selanjutnya berupa pelatihan atau pemagangan secara terbuka melalui uji kompetensi

pada aplikasi yang dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran di kota Bandung. Dengan adanya program tersebut untuk mengakomodir angka pengangguran yang bertujuan supaya masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu yang telah tersertifikasi dari program yang telah dibuat. Selain itu juga, pada beberapa dimensi yang belum terpenuhi seperti pada dimensi *Data analysis Capability*, masih banyak perusahaan yang belum terdaftar dan wajib lapor kepada dinas terkait lowongan pekerjaan karena tidak adanya aturan khusus terkait hal tersebut. Lalu pada dimensi *Performance Management Capability* perlu adanya peningkatan kualitas Sumber daya manusia yang terdapat di dinas untuk paham dalam memahami alur pada aplikasi BIMMA secara menyeluruh yang tidak hanya verifikasi data saja. *Insight Explotation Capability*, dalam indikator pengembangan perangkat lunak dalam pencetakan kartu kuning pencari kerja yang masih terdapat *error* dikarenakan yang muncul menjadi nomor resi saja, pembuatan Perjanjian Kerjasama waktu tertentu (PKWT) yang dilakukan harus beberapa kali tahapan penginputan dan dipaksa untuk dilakukan secara manual. Bahwa dari data tersebut dapat dijadikan kebijakan untuk mengatasi angka pengangguran di Kota Bandung berbasis data.

Maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi pada pengoperasian dan pemanfaatan data aplikasi BIMMA yang dapat dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yaitu: Perlu adanya aturan khusus dari pihak Dinas Tenaga kerja Kota Bandung dalam penerapan aplikasi BIMMA; Perlu adanya edaran dari pemerintah daerah untuk perusahaan dalam melakukan wajib lapor kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berupa adanya perjanjian tertulis; Penambahan kapasitas Random Access Memory (RAM) dalam Pilot server pada aplikasi BIMMA dan sebagai sarana mengadakan pelatihan secara digital lewat aplikasi; serta adanya Program *Job Fair* yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan baik dilakukan instansi maupun Lembaga akademik.

Referensi

- Ahmad, E. F., & Aliyudin, R. S. (2020). Pengaruh Implementasi Big Data Terhadap Audit di Lembaga Pemerintah (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Majalengka). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 68. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1141>
- Alia, S., & Ratnasari, E. (2021). Aplikasi Pikobar Solusi Digital Andalan Bagi Jawa Barat Untuk Covid-19. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 3(3). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/14670/pdf>
- Anggraeni, H. D., Saputra, R., & Noranita, B. (2013). Aplikasi Data Mining Analisis Data Transaksi Penjualan Obat Menggunakan Algoritma Apriori. *Journal of Informatics and Technology*, 2(2), 22–28. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/CBO9781139058452A007/type/book_part
- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, volume 4(4), hlm. 1593.
- Awaludin, A. (2020). *Angka Pengangguran Tinggi, Kota Bandung Siapkan Bursa Kerja Online 2020*. Dara.Co.Id. <https://www.dara.co.id/angka-pengangguran-tinggi-kota-bandung-siapkan-bursa-kerja-online-2020.html>

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi*. BPS - Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- Bandung, B. P. S. K. (2021). *Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandung*. Bandung, Badan Pusat Statistik Kota. <https://bandungkota.bps.go.id/indicator/6/95/1/tingkat-pengangguran-terbuka.html>
- Barat, B. P. S. P. J. (2021). *TPAK Kabupaten/Kota*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Statistics of Jawa Barat). <https://jabar.bps.go.id/indicator/6/89/1/tpak-kabupaten-kota.html>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Desain Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi 4)* (A. Fawaid (ed.); ke-4). Pustaka Pelajar.
- Fajriyah, N., Setiawan, W., Ernawati, D., & Tobias, D. (2022). Implementasi Teknologi Big Data Di Era Digital. *Jurnal Informatika*, 1(1). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JI/article/view/382/321>
- Fanita, R. (2016). Analisa Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(12), 88–93. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/viewFile/97/97>
- Hakim, R., Umam, K., & Anwar, H. S. (2021). Implementation of E-Government through the Samsat Mobile Jawa Barat at the Regional Revenue Agency of West Java Province. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 13(2), 134–148. <https://doi.org/10.15575/jpan.v13i2.13867>
- Halim, F. R., Astuti, F., & Umam, K. (2021). Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 48–67.
- Hall, M. (2008). The effect of comprehensive performance measurement systems on role clarity, psychological empowerment and managerial performance. *Accounting, Organizations and Society*, 33(2–3), 141–163. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.02.004>
- Indrajit, R. E. D. (2007). *Electronic Governmnet in Action (Strategi Implementasi di Berbagai Negara)*.
- Islah, K. (2018). *Peluang Dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Big Data Untuk Mengintegrasikan Pelayanan Publik Pemerintah*. 5(1), 130–138. <https://doi.org/10.31219/osf.io/uf63v>
- Jia, L., Hall, D., & Song, J. (2015). The conceptualization of data-driven decision making capability. *2015 Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2015, 2011*.
- Jumiati, I. E. (2010). Electronic Government : Suatu Inovasi Peningkatan Manajemen Publik Dalam Kerangka Good Governance. *Administrasi PUblik*, 1(1), 1–25. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/2828/2229>
- Lavalle, S., Lesser, E., Shockley, R., Hopkins, M. S., & Kruschwitz, N. (2011). Big Data, Analytics and the Path from Insights to Value. *MIT Sloan Management Review*, 52(2), 21–31.
- Napitupulu, D. (2015). Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government. *Jurnal Sistem Informasi*, 5(3), 229–236. http://is.its.ac.id/pubs/oajis/index.php/file/download_file/1445
- PROKOPIM. (2021). *Perusahaan di Kota Bandung Wajib Sebar Info Lowongan Kerja*. PROKOPIM Kota Bandung. <https://humas.bandung.go.id/layanan/perusahaan-di-kota->

bandung-wajib-sebar-info-lowong

- Sinaga, E. S. (2021). Efektivitas Pelayanan Bursa Kerja Online melalui Aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara (JANE)*, 12(2), 1–18.
- Sirait, E. R. E. (2016). Implementasi Teknologi Big Data Di Lembaga Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 6(2), 113. <https://doi.org/10.17933/jppi.2016.060201>
- Solihin, O. (2021). *Implementasi Big Data Pada Sosial Media Sebagai Strategi*. 5.
- Surdin, J. (2016). Analisis Kelayakan Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Keagrariaan Di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(1), 178–191. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/1892/1057>